

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- AGENDA. 2013. “*Accessible Elections for Persons With Disabilities in Indonesia (Aksesibilitas Pemilu untuk Difabel di Indonesia)*”. Jakarta: PPUA PENCA.
- Bungin, Burhan. 2002. “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,.
- Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI. 2013. “Kewajiban Indonesia Paska Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Langkah-langkah Implementasi”. Dikemukakan dalam Buku Informasi Lokakarya Nasional Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kementerian Luar Negeri RI.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- IDEA. 2006. *Electoral Management Design*. The International IDEA Handbook. International IDEA
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Kofi, Annand. 2012. “*Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Pemilihan Umum*”. Genewa: Kofi Annan Foundation
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. “*Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*”. Jakarta: KPU.
- Komisi Pemilihan Umum. 2015. “*Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah*” Jakarta: KPU.
- Mujani, Saiful.2007, *Muslim Demokrat. Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Torres & diaz (2011), *Electoral Governance More Than Electoral Administration, Jurnal Mexico Law*, volume VII, hal : 31-46

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006. Hlm.3.

**Sumber Jurnal:**

Ayi Haryani dan Enung Huripah, 2014, Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna" . *Jurnal Agregasi. Volume 2 / Nomor 1 / Tahun 2014. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom.* Hal 89-104

Aprilya Juwita Sari dan I Made Suwanda, 2014. "Implementasi Pendidikan Demokrasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu Di Smalb-B PGRI Dlanggu", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan.* Volume 2. Nomor 3 . PPKn. FIS. Universitas Negeri Surabaya. Hal 1046-1060

Artis, 2012. "Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Sosial Budaya* Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012. Hal 59-80

Ishak, Salim. 2015. "Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia". *The Politic.* Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015. Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hal 127-155

Merly, Mario. 2015. Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional.* Vol. 21, No. 2, Agustus 2015. Hal 61-77

Mozaffar and Schedler (2002), *The Comparative study of Electoral Governance*, *Jurnal International Political Science*, Volume 23, hal : 5-27

Putu Ratih Kumala Dewi. 2015. "Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC*, 26 Agustus 2015. Hal 543-550

**Laporan Penelitian:**

Bakaruddin Rosyidi dan Canang Bagus Umpu Prahara, 2016. "Politik Uang (Vote Buying) dan Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Sumber Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

UU RI Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah Serentak.

UU RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sumber Internet:

<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

[https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov/kabupaten\\_padang\\_pariaman](https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov/kabupaten_padang_pariaman)

<http://jdih.setjen.kemendagri.go.id>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150128192042-32-28133/kpu-siap-penuhi-hak-politik-penyandang-disabilitas-di-pilkada>

<https://sumbar.antaranews.com/berita/164161/kpu-padangpariaman-sosialisasikan-pilkada-kepada-pemilih-pemula>